

**PENDIDIKAN DALAM HIMPITAN KAPITALISME: TINJAUAN
KRITIS ATAS PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN
POSISIONALITAS GURU**

Willem Batlayeri, S. Fils., M. Hum

Dosen Pengajar STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon

ABSTRAK

This article is meant to be a critical reflection on the ideal responsibility of educational institutions and the role of the teachers in today's world of education. The article focuses on the problem of the declining morality of the education as a result of the hegemony of global capitalism. This becomes apparent in the spreading of the culture of industrialisation and commercialisation of education. The moment has come to reflect seriously on the genuine culture, so as to build a new paradigm in matters of education, especially by reconstructing the ideal role and responsibility and the reposition of the role of the teachers, specifically the catholic teachers of religion in the world of education. To this end, as a base of analysis on the above mentioned matters, in this article some critical thoughts in matters of culture will be the base of analysis.

KATA-KATA KUNCI:

Pendidikan, Kapitalisme, Lembaga Pendidikan, Guru

Pendahuluan

Tulisan ini merupakan sebuah kritik budaya atas situasi pendidikan akhir-akhir ini. Terutama kegelisahan saya atas polemik pendidikan modern dan realita kehidupan para guru, secara khusus guru agama katolik yang cenderung menempatkan diri sebagai pelayan kapitalitas dari pada sebagai *intelektual publik oposisional*. Artinya, guru agama katolik

diharapkan dapat menjalankan perannya seorang pendidik dan pengajar yang profesional, baik dalam dunia pendidikan maupun dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat. Terutama sadar akan hegemoni kapitalisme global yang telah merasuki institusi-institusi pendidikan formal. Sekolah menjelma sebagai *Ideological State Apparatus* (dalam pengertian Louis Althusser) yang menginterpelasi subjek didik. Sekolah tidak lagi netral, bahkan menjadi arena pertarungan ideologi kekuasaan, kesenjangan sosial, dan produksi serta reproduksi tenaga kerja handal demi kepentingan pasar global.

Bertolak dari kondisi semacam ini, penting untuk dipertimbangkan bersama pada kesempatan ini adalah praktek pendidikan yang tidak lagi menghancurkan identitas subyek didik. Dengan kata lain, praktek pendidikan yang perlu membebaskan subyek dari hegemoni kapitalisme global, meminimalisir aneka kesenjangan sosial dan menghentikan aneka praktek ketidakadilan sosial dalam dunia pendidikan. Pertanyaannya adalah: *Bagaimana menggagas model pendidikan kritis yang relevan dalam dunia dewasa ini?* Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut, pertama-tama saya ingin mendalami beberapa pokok persoalan penting terkait (i) rezim pendidikan di abad modern; (ii) tanggung jawab ideal institusi pendidikan dalam dunia dewasa ini; dan (iii) posisionalitas guru (agama katolik) dalam himpitan kapitalisme global.

1. Rezim Pendidikan di Abad Modern

Istilah “rezim” dalam tulisan ini merujuk pada situasi di mana daya kritis manusia semakin meresot akibat kekuatan hegemonik. Hegemonik dalam pengertian masyarakat atau dunia pendidikan kita seakan-akan telah terfiksasi secara mutlak. Kondisi di mana elemen-elemen tidak lagi

terkristalisasi menjadi momen sehingga tidak ada lagi ruang bagi munculnya praktek artikulasi sebagaimana dimaksudkan oleh Laclau-Mouffe.¹ Laclau-Mouffe dalam *Hegemony dan Socialist strategy* mengingatkan agar selalu mau menyadari bahwa pada dasarnya praktek artikulatoris tidak pernah terfiksasi secara mutlak. Oleh sebab itu, meski formasi hegemonik menduduki peranan penting dalam masyarakat (seperti yang dimaksudkan oleh Antonio Gramsci); akan tetapi formasi hegemonik bukan untuk membentuk blok historis melainkan untuk mengisi ruang kosong yang tercipta akibat adanya krisis. Formasi hegemonik perlu hadir sebagai respon terhadap retakan sosial. Formasi hegemonik bukan terletak pada bagaimana menjamin terbentuknya kesatuan kelas baru; akan tetapi bagaimana membangun dan mengaktualisasikan kembali ranah sosial untuk memaknai sejarah secara baru. Persoalannya, *bagaimana sejarah sosial dapat dimaknai secara baru jika kita masih nyaman berada dalam kubangan hegemoni kapitalisme?*

Pertanyaan di atas perlu dipertimbangkan secara serius sebab realita dunia pendidikan yang kita gumuli akhir-akhir ini telah dirasuki oleh bujuk rayuan manis kapitalisme global. Dalam konteks itu, wacana kapitalisme kini tidak cukup dipahami lagi sebatas kepemilikan alat produksi, relasi buruh dan majikan atau hubungan basis dan superstruktur, dalam pengertian Karl Marx. Sebaliknya, kapitalisme perlu dipahami dan dikenali secara komprehensif berdasarkan sifat dan karakteristiknya yang kompleks. Paling tidak sadar akan kondisi yang membelenggu dunia

¹Ernesto Laclau and Chantal Mouffe (1985), *Hegemony & Social Strategy: Towards a Radical Democratic Politic*. London-New York: Verso, 134; *Hegemony dan strategi sosialis: postmarxisme dan gerakan sosialis baru*, ter. Eko Prasetya Darmawan, 202.

pendidikan kita, mereifikasi nilai-nilai pendidikan, bahkan membungkam diri kita. Beberapa fenomena yang mengindikasikan kondisi keterpurukan dunia pendidikan dalam hegemoni kapitalisme global adalah sebagai berikut:

1.1. Teknologi Politis Pendidikan

Istilah teknologi politis secara khusus digunakan oleh Michel Foucault dalam *Dicipline and Punish* untuk menunjukkan mekanisme penaklukan individu dalam praktek wacana. Bidang utama Foucault adalah relasi kekuasaan-pengetahuan dan konstruksi subyek dalam praktek wacana. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah wacana penaklukan dalam praktek wacana tidak lagi menyentuh tubuh melainkan jiwa atau pikiran manusia.² Inilah wujud dari teknologi pendisiplinan manusia-manusia modern yang sering kali sulit disadari keberadaannya. Artinya, orang hidup dalam rezim kekuasaan, tanpa menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam wacana penaklukan. Dengan kata lain, orang takluk bukan kerana terpaksa melainkan karena kehendak sendiri mau melaksanakannya.

Implikasi pemikiran Foucault mengenai teknologi politis tubuh dalam dunia pendidikan di abad modern ini terletak pada ketidakmampuan aparat pendidikan berhadapan dengan wacana kekuasaan yang beroperasi dalam dunia pendidikan. Wacana kekuasaan tersebut hadir melalui ketidakmampuan tenaga pendidik berhadapan dengan: (i) polemik pembiayaan operasional pendidikan yang menyebabkan banyak lembaga pendidikan memiliki ketergantungan penuh terhadap kaum kapitalis; (ii) arus investasi modal asing dalam dunia pendidikan yang menggiring

²Michael Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the prison*, Terj. Alan Sheridan dari judul asli *Surveiller et punir*, (New York: Vintage Books, 1979), 26-25.

banyak lembaga pendidikan berebut ruang dalam mereproduksi ideologi pasar bebas. Konsekuensinya, orientasi pendidikan hanya akan memproduksi dan mereproduksi *out put* (lulusan) sebagai tenaga kerja handal; (iii) penyelenggaraan pendidikan berbasis profit di bawah payung Neo-liberalisme di mana banyak pemikiran positif dipakai untuk menjelaskan dan mendukung mekanisme pasar bebas.

Orientasi pendidikan cenderung bersifat deterministik ekonomi. Hal ini ditandai oleh situasi pendidikan yang sangat mengedepankan hubungan produksi dan sarana produksi dari pada kebebasan subyek. Terjadi reifikasi nilai-nilai pendidikan dan komodifikasi institusi-institusi pendidikan sebagai tempat reproduksi aneka kecakapan akademis untuk memenuhi kebutuhan pasar.³ Terjadi semacam ritual pendisiplinan subjek melalui pendidikan di mana wacana *micro-physics of power* (mikro-fisik kekuasaan) bekerja secara masif melalui rangkaian kebijakan strategis dalam dunia pendidikan.⁴

1.2. Komersialisasi Pendidikan

Secara khusus dalam dunia pendidikan, fenomena komersialisasi pendidikan sungguh-sungguh menjadi ancaman tersendiri bagi kita saat ini. Hal ini disampaikan terkait ekspansi pasar bebas yang menginvasi banyak hal. Paling tidak sebagai dasar pikir adalah: *apakah kehadiran pasar untuk melayani masyarakat atau sebaliknya masyarakat justru melayani pasar?* Pada titik ini, yang perlu disoroti adalah peran dan fungsi negara sebagai pengawas atau pengontrol. Artinya, ketidakmampuan negara dalam mengawasi ekspansi pasar menyebabkan masyarakat lupa

³Madji Sutrisno & Hender Putranto, *Teori-teori kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 28.

⁴Michael Foucault, *Discipline and Punish*,... Ibid., 26.

diri dan tidak mampu membangun daya kritis terhadap seluruh kebijakan strategis ekonomi politik yang berkembang.

Ekspansi pasar global sesungguhnya tidak hanya menyentuh dunia ekonomi; akan tetapi berimbas pada seluruh dimensi kehidupan manusia, terutama dunia pendidikan formal. Kecemasan ini berdasar pada fenomena pendidikan akhir-akhir ini yang seakan-akan bertindak sebagai pasar. Sayangnya dalam kondisi semacam ini, para guru yang diharapkan lebih bersikap kritis malah “dijinakan” dengan bujuk rayuan kapitalisme melalui aneka tunjangan profesi. Bahkan wacana profesionalisme guru yang dihembuskan oleh pemerintah seakan-akan berhenti pada persoalan pengumpulan dokumen, kualifikasi akademik kesarjaan; bukan pada persoalan kedalaman nilai dan keilmuan. Di sisi lain, terjadi pula praktek komodifikasi hubungan guru murid sebatas hubungan transaksional akibat ketidakpastian kurikulum.

Persoalannya adalah: apakah fenomena penyimpangan yang terjadi selama ini disadari sebagai bentuk pembungkaman pendidikan? Apakah sempat terpikirkan mengenai esensi aneka tunjangan profesi yang diperbincangkan selama ini? Apakah praktek sertifikasi yang dilakukan selama ini ditempatkan sebagai ajang pembuktian kualitas diri sebagai seorang pendidikan dan pengajar ataukah sebaliknya menjadi ajang manipulasi dokumen? Persoalan-persoalan semacam ini, seringkali disepeleahkan, seakan-akan tidak ada masalah. Akan tetapi tanpa disari sebetulnya dengan kehendak sendiri kita memilih untuk menginternalisasi wacana penaklukkan dengan memposisikan diri sebagai pelayan kapitalis.

1.3. Industrialisasi Pendidikan

Budaya industri merebak ketika tokoh-tokoh *Frankfurt School* seperti Theodor Adorno dan Max Horkheimer mendekonstruksi proyek pencerahan. Sebagaimana dikutip oleh Madji Sutrisno & Hender Putranto dalam *Teori-teori kebudayaan* (2005). Adorno dan Horkheimer melihat bahwa proyek pencerahan telah mati karena lebih mementingkan keuntungan yang lebih besar dari pada memperhatikan kedalaman nilai sebagai bentuk kritis dan kebebasan manusia.⁵ Gejolak perkembangan industri telah menempatkan manusia sebagai barang komoditi yang direproduksi dalam aneka cara. Kemampuan rasionalitas dalam filsafat bertendensi untuk memprostitifkan mekanisme kapitalisme. Hal ini, mempengaruhi seluruh dimensi kehidupan manusia. Salah satu di antaranya adalah dunia pendidikan.

Persoalannya adalah: *Sejauhmana kebenaran yang diproduksi dalam praktek pendidikan bebas dari hegemoni sistem kapitalis?* Pertanyaan ini mengajak kita untuk mempertimbangkan kembali proses pendidikan agar tetap berada pada relnya dalam membangun kesadaran kritis warga; bukan *false consciousness* (kesadaran palsu). Kesadaran palsu dalam pengertian praksis pendidikan yang selalu bersifat ekonomis semata. Bahkan institusi pendidikan malah menjadi lembaga ideologi yang penuh dengan topeng dan terdistorsi dari realitas objektif.⁶ Artinya, praktek pendidikan seakan-akan menyembunyikan kenyataan objektif demi kepentingan penguasa dengan mengendalikan kelompok yang lemah. Akibatnya, lembaga pendidikan hanya akan menjadi arena bisnis;

⁵Madji Sutrisno & Hender Putranto, *Teori-teori kebudayaan*,... Ibid., 37-38.

⁶John Storey, *Teori Budaya dan budaya pop: memetakan konsep cultural studies*, Terj.Elli El Fajri, (Yogyakarta: Qalam, 2003), 4-5.

hubungan guru murid sebatas hubungan produksi; dan didominasi oleh jargon-jargon politik, agama, suku, etnis dan sebagainya.⁷

Praktek pendidikan hanya mendogmatisasi kebenaran tanpa membuka ruang khusus untuk mendialogkan kebenaran yang diproduksi. Pendidikan tidak lagi menuntun anak muda atau subjek didik untuk mau menyadari akan relasi kuasa yang membingkai setiap praktek budaya dalam dunia pendidikan dan kehidupan bermasyarakat. Menghadapi persoalan semacam ini, aspek pluralitas perlu dikedepankan, terutama dalam pendidikan agama. Tujuannya untuk menentang dominasi ideologi dalam pendidikan; termasuk praktek komersialisasi pendidikan. fenomena pendidikan semacam ini perlu mendapat perhatian serius agar aspek kedalaman nilai dan kebebasan subyek dapat terwujud melalui pendidikan. singkatnya, manusia tidak dapat direduksi menjadi barang komoditi dalam pasar. Oleh sebab itu, pendidikan sebagai aktivitas fundamental manusia perlu menempatkan manusia sebagai subyek atau memanusiakan manusia. Pendidikan harus bersifat personalistik demi perkembangan manusia. Pendidikan harus menanamkan rasa tanggung jawab, rasa kehormatan sehingga anak dapat dituntun untuk menemukan kemandirian hidup.

1.4. Krisis Identitas Guru

Kategori identitas umumnya dipakai untuk menjelaskan tentang sesuatu yang membedakan dirinya dengan sesuatu yang lain. Kata identitas menunjuk pada karakteristik, kekhususan, atau nama dari kategori tertentu yang membedakannya dengan sesuatu yang lain. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah identitas pada dasarnya tidak ada dengan sendirinya dan bukanlah sesuatu yang final. Identitas adalah

⁷Ibid., 144.

hasil konstruksi sosial dan selalu dalam proses menjadi. Dengan kata lain, individu selalu memiliki keterikatan penuh dengan identitasnya yang dibentuk oleh pengetahuan akan identitas. Dalam konteks itu, analisis atas wacana yang dilakukan oleh kebanyakan orang, seperti Michel Foucault tidak sekedar dilihat sebagai tempat memproduksi kekuasaan; akan tetapi menjadi tempat untuk memproduksi subyek. Artinya, wacana mengkondisikan diri kita sebagai individu dalam ruang lingkup dan batasan tertentu yang memungkinkan diri kita berpikir dan berkata-kata menurut kebenaran wacana.⁸ Dalam pengertian inilah, identitas subyek tidak akan pernah tuntas atau final melainkan secara terus-menerus berada dalam proses menjadi berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan secara rasional dan masuk akal.⁹

Oleh karena identitas merupakan hasil konstruksi sosial dan bukanlah sesuatu yang final maka identitas dalam kondisi tertentu dapat mengalami guncangan. Guncangan terhadap identitas dapat terjadi karena ancaman atau tekanan baik yang dilakukan secara terpaksa maupun dengan kehendak sendiri menginternalisasi tekanan tersebut tanpa disadari. Momen semacam ini yang sering disebut-sebut sebagai momen hegemonik yakni kondisi di mana orang hidup dibawah bujuk rayuan manis tekanan rezim tertentu tanpa memiliki daya kritis untuk mempertanyakannya. Dalam situasi sekarang, terutama dalam dunia pendidikan, guncangan terhadap identitas guru maupun murid dapat saja

⁸Donald E. Hall, *Subjectivity: The New critical Idion*, (New York and London: Routledge, 2004), 91.

⁹Julia Menard-Warwick (2005), "Both a fiction and an existential fact: theorizing identity in second language acquisition and literacy studies" dalam *Linguistics and Education*, 257

terjadi ketika hegemoni kapitalisme global tidak lagi disadari keberadaannya. Itu artinya, orientasi pendidikan untuk mencapai kedalaman nilai dan kebebasan subyek dihancurkan oleh kepentingan kelompok kapitalis untuk membungkam pendidikan, menciptakan kesenjangan sosial, bahkan mereproduksi mekanisme pasar.

Sangat disayangkan jika persoalan-persoalan semacam ini tidak segera disikapi secara kritis. Fenomena dunia pendidikan yang semakin merosot urgen untuk ditindaklanjuti agar para guru/kaum intelektual tidak selamanya menjadi pelayan kaum bourgeois dan institusi-institusi pendidikan tidak selamanya bertidak sebagai pasar. Ironik jika kesadaran diri sebagai seorang guru/pengajar baru akan dirasakan ketika sibuk mengumpulkan aneka dokumen dan bukti-bukti pengembangan diri lainnya untuk mendapatkan tunjangan profesi, seperti yang disampaikan oleh St Kartono dalam bukunya *Sekolah bukan pasar* (2009). Menarik dari permenungan kartono adalah proses sertifikasi yang dimaksudkan untuk pengembangan prestasi dan profesionalisme guru, malah direifikasi sebatas piagam atau sertifikat sehingga yang terjadi adalah praktek sertifikasi hanya dimaknai sebagai ajang menumpuk piagam kosong.¹⁰

Permenungan semacam ini paling tidak menjadi otokritik melihat fenomena pergeseran nilai dan krisis identitas guru sebagai pendidik dan pengajar yang kritis dan oposisional dalam dunia dewasa ini. Sangat disayangkan jika predikat sebagai seorang guru profesional yang disandang oleh para guru dipatahkan oleh ketidakmampuan membijaki dan menyikapi kebijakan-kebijakan strategis politik; ketidakmampuan dalam merancang program pembelajaran semesteran atau tahunan;

¹⁰St. Kartono, *Sekolah bukan pasar*, (Jakarta: Kompas, 2009), 99-101.

ketidakmampuan menyusun silabus dan RPP; ketidakmampuan dalam mengembangkan bahan ajar dan potensi diri, kurang kreatif dan minimnya keteladanan diri dalam lingkup pelayanan di sekolah, Gereja maupun masyarakat.

Bertolak dari beberapa pokok persoalan yang telah diuraikan di atas, pertanyaannya sekarang adalah: *Apakah yang perlu dilakukan dan bagaimana hal tersebut dilakukan?* Pertanyaan semacam ini penting untuk dipertimbangkan bersama agar memungkinkan kita dapat mereorientasi pendidikan dan mereimajinasi hidup dan kehidupan kita melalui pendidikan sejak dini. Dalam konteks itu, berikut ini saya ingin mengemukakan dua pokok pikiran penting terkait tanggungjawab ideal institusi pendidikan dan posisionalitas para guru berhadapan dengan rezim pendidikan dewasa ini. uraian atas kedua pokok pikiran tersebut, secara rinci akan diuraikan di bawah ini.

2. Tanggung Jawab Ideal Lembaga Pendidikan

Bicara mengenai tanggung jawab ideal lembaga pendidikan, kita diajak untuk menyikapi secara kritis bagaimana lembaga-lembaga pendidikan (dasar, menengah dan perguruan tinggi) memandang kehadirannya dan seluruh kegiatannya dalam praksis pendidikan. Hal ini selaras dengan misi pendidikan sebagai aktivitas fundamental manusia untuk memanusiaikan manusia; melepaskan belenggu keterikatan ideologis dan kekuasaan agar dapat mengalami pembebasan. Dalam konteks itu, kehadiran lembaga pendidikan diharapkan agar tidak hanyut dalam arus kekuatan kapitalisme global. Sebaliknya, kehadiran lembaga pendidikan dalam dunia dewasa ini dapat menjadi “*seminari*” (tempat pembibitan)

bagi manusia-manusia muda yang cerdas, beriman, bermoral dan bertanggung jawab terhadap masyarakat, Gereja dan dunia.

Lembaga pendidikan perlu menjadi wadah pembinaan dan pendidikan manusia muda yang bersusila dan demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Secara khusus, lembaga pendidikan tinggi dituntut untuk membentuk manusia-manusia muda yang: (i) mempunyai keinsyafan tanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya; (ii) cakap berdiri sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan; dan (iii) cakap untuk memangku jabatan negeri atau pekerjaan masyarakat, yang memerlukan perguruan tinggi.¹¹ Tanggungjawab tersebut bukan semata-mata menjadi tanggungjawab lembaga pendidikan tinggi; akan tetapi perlu dibiasakan sejak dini pada lembaga pendidikan dasar (SD), lanjutan tingkat pertama (SMP/SLTP) dan lanjutan tingkat atas (SMA/SMU). Selain itu, penting untuk disadari bersama adalah orientasi pendidikan sebetulnya bukan sebatas melahirkan manusia-manusia muda yang memiliki kecakapa akademis; akan tetapi manusia-manusia muda yang sungguh-sungguh bermoral dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebaikan, kejujuran dan kebenaran.

Praktek pendidikan buklah sebatas *tranver of knowledge* atau pendidikan dengan sistem *banking* di mana guru dianggap sebagai sang mahatahu. Praktek pendidikan ideal adalah praktek yang berorientasi pada kedalaman nilai dan pembebasan subyek sebagai manusia-manusia muda

¹¹Mohammad Hatta, “Tanggungjawab moral kaum intelegensi” dalam Aswab Mahasin & Ismed Nasir, *Cendikiawan dan Politik*, (Jakarta: LP3S, 1983), 6-7. Kutipan yang sama, penulis peroleh pula dari St Sunardi, *Bicara pendidikan Tinggi di Indonesia di Tengah Kegagalan Reformasi Pendidikan*, 6 (Bahan kuliah pada mata kuliah Kajian Universitas, Universiatas Sanata Dharma, Program Magister Ilmu Religi dan Budaya

yang kritis dan oposisional. Kritis dalam pengertian ada ruang dialektika yang transformatif dengan ruang-ruang publik di luar lingkungan sekolah. Demikian pula oposisional seperti yang dimaksudkan oleh Hendri A Giroux. Konsep oposisional digunakan oleh Giroux untuk menegaskan peran kaum intelektual dalam kerja budaya agar yang tidak hanya menciptakan teori-teori mutahir melainkan bagaimana teori tersebut dibuat menjadi lebih sosial.¹² Singkatnya, praktek pendidikan yang menjadi tanggungjawab masing-masing institusi pendidikan adalah menyumbangkan kepada para murid sesuatu yang diketahui baik dan sesuatu yang bisa ia lakukan dengan baik.¹³

3. Peran Lembaga Pendidikan Katolik

Secara khusus, bicara mengenai tanggung jawab ideal lembaga pendidikan katolik, praktek pendidikan katolik perlu diposisikan sejajar dengan kehendak Gereja Katolik Universal tentang pendidikan. Tuntutan semacam ini menjadi dasar bagi kita untuk pertimbangan kembali peran dan posisi lembaga-lembaga pendidikan katolik berhadapan dengan ancaman kekuatan global. Dalam konteks itu, kehadiran lembaga-lembaga pendidikan formal di bawah naungan gereja katolik secara umum dituntut untuk dapat menciptakan suasana akademis yang edukatif, partisipatif dan transformatif. Nilai edukatif dalam praktek pendidikan merepresentasikan posisi lembaga-lembaga pendidikan katolik untuk hadir sebagai sebuah realitas edukatif sebagaimana tersurat dalam *Gravisium Educationis* dan

¹²Bdk., Hendri A Giroux, *Impure Acts: the practical politic of culture studies*, (New York: Routledge, 2000), 128.

¹³Johanes Oentoro, "Perguruan Tinggi kita: Tugas dan Tantangannya di masa kini" dalam Alexander Jatmiko W dkk, *Peran perguruan tinggi dalam penyiapan SDM yang kritis dan bermoral: sebuah harapan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 91.

Lumen Gentium. Kedua dokumen tersebut, secara bersamaan menegaskan kehendak Gereja katolik untuk memposisikan lembaga pendidikan agama katolik sebagai “komunitas teologis”.¹⁴ Cara pandang semacam ini dipandang relevan dengan karya pelayanan pastoral Gereja di tengah dunia dengan melakukan sintesa budaya dengan pesan injili. Pada titik ini, para guru agama katolik dituntut untuk mampu memposisikan diri sebagai instrumen pemanusiawian manusia atau memanusiaikan manusia.¹⁵

Di sisi lain, keterlibatan gereja dalam pendidikan tidak serta merta dibatasi pada aspek internal gereja. Akan tetapi, kehadiran gereja dalam dunia (Bdk., *Lumen Gentium*) mendorong gereja untuk seoptimal mungkin memaknai kehadirannya di dunia. Secara khusus, melalui pendidikan, karya pewartaan injil bagi dunia dapat teraktualisasi secara efektif. Amanah konsili suci menegaskan bahwa pendidikan kristiani berorientasi pada pembinaan pengembangan bakat, fisik, moral, dan intelektual.¹⁶ Aspek pengetahuan dan pengembangan diri menjadi tanggungjawan

¹⁴Istilah “komunitas teologis” yang dimaksudkan disini lebih menitik beratkan pada sebuah instrumen yang memfasilitasi Gereja dalam karya pewartaannya. Komunitas teologis dalam konteks pendidikan, adalah sekolah-sekolah katolik yang diperuntukan dan dipercayakan oleh Allah untuk menjalankan karya pewartaan Allah. Dengan demikian di dalam dan melalui komunitas ini, Allah dapat berkarya dan umat beriman dapat mengalami perbuatan-perbuatan besar Allah.

¹⁵Joseph Ansow, *Misi Edukatif sekolah katolik: Legitimasi Pendidikan agama katolik di sekolah Katolik*, (Manado: STF-SP, 2005), 56-57.

¹⁶“Gravissimum educationis” dalam *dokumen konsili vatican II* terjemahan R. Hardiwiryan (Jakarta: obor, 1993), 293. Bdk juga dengan Nota Pastoral KWI 2008 tentang pendidikan dan keputusan sidang pleno XIII KOMDIK KWI pada tanggal 8 s.d. 10 oktober 2009 di Denpasar dengan tema: “lembaga pendidikan katolik: media pewartaan kabar gembira, unggul dan lebih berpihak kepada yang miskin”. Selain itu, Reksa Pastoral pendidikan katolik yang menghendaki kehadiran Gereja dengan memberi perhatian dan bantuan dalam kegiatan dan pelayanan pastoral pendidikan yang diberikan kepada umat agar mereka semakin menjadi dewasa dan mampu menciptakan tatanan hidup yang dijiwai oleh nilai-nilai kristiani.

lembaga pendidikan agama katolik. Sehubungan dengan maksud tersebut, lembaga pendidik agama katolik diharapkan agar dapat menyiapkan peserta didik untuk tidak hanya memiliki pengetahuan, melainkan menjadi pribadi yang matang dan dewasa dalam hidup bermasyarakat.

Lembaga pendidikan katolik diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang benar-benar kritis. Artinya, lembaga pendidikan katolik dituntut untuk menunjukkan keterlibatannya dalam kehidupan masyarakat dan berani menjamin misi perubahan sosial. Dengan cara semacam ini, keterlibatan Gereja Katolik di dunia dewasa ini melalui pendidikan dapat menciptakan ruang-ruang publik yang dialogis antara Gereja, sekolah dan masyarakat. Konsekuensinya, sistem pendidikan yang dibangun di bawah payung Gereja Katolik perlu didesain sedemikian rupa sehingga mampu menciptakan manusia-manusia muda yang beriman (*fides*), bermoral (*mores*), dan cerdas/kritis (*intellectum*).

Lembaga pendidikan katolik perlu melakukan semacam sintese budaya antara kebenaran iman dengan realita kehidupan sehari-hari. Pada titik ini, aspek keteladanan guru pendidik agama katolik dapat menjadi salah satu poin penting dalam pengembangan mutu pendidikan katolik. Artinya, pendidikan agama katolik sebagai suatu disiplin ilmu yang diajarkan oleh para guru agama katolik sedapat mungkin perlu berjalan sinergis dengan apa yang diajarkan dan apa yang dilakukan sehingga tiga pilar utama dalam praktek pendidikan agama katolik seperti iman, moral dan intelektual dapat berjalan secara serasi. *Petama-tama*, dari aspek pendidikan intelektual maka, lembaga pendidikan katolik bertanggungjawab dalam mendidik manusia muda agar memiliki pengetahuan dan pengertian akan pengalaman religiusnya. Dengan kata lain, pendidikan agama katolik

harus mampu menghantar setiap peserta didik untuk mampu mengambil keputusan atas berbagai pilihan secara bebas dan penuh rasa tanggung jawab sehingga tercipta kesesuaian antara pikiran dan perbuatan.

Kedua, dari sisi pendidikan iman, lembaga pendidikan katolik melalui pengajaran agama katolik diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam menjaga dan merawat iman semua kaum beriman, terutama pendewasaan iman peserta didik agar mampu bertahan di tengah menguatnya arus pendidikan kapitalisme. Praktek pendidikan agama katolik dimaksudkan untuk mencapai keutamaan dan kualitas hidup moral yang tidak hanya mencakup tindakan baik/buruk; akan tetapi perbuatan yang merujuk pada kemampuan seseorang dalam melakukan perbuatan yang tidak bertentangan dengan penalaran akal sehat dan demi terwujudnya kebahagiaan sejati (*Bonum Communae*) di dunia. Pada titik ini, peran guru agama katolik dituntut untuk dapat berperan aktif dalam menghantar para peserta didiknya guna menemukan kebahagiaan sejatinya. Dengan cara-cara semacam ini, proses pembelajaran agama katolik yang diselenggarakan oleh masing-masing lembaga pendidikan katolik dapat meminimalisir praktek-praktek pembelajaran tradisional yang didominasi mekanisme pembelajaran *banking* di mana guru menganggap diri sebagai sang maha tahu; melainkan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif, dialogis dan transformatif sehingga subyek didik dapat secara kritis mengambil posisi berhadapan dengan ancaman-ancaman kekeuatan global, bujuk rayuan kapitalisme, dan menemukan dirinya sendiri dalam relasi dengan Tuhan dan sesamanya.

4. Posisionalitas Guru dalam Wacana Kapitalisme

Selain mempersoalkan mengenai tanggung jawab lembaga pendidikan, unsur lainnya yang perlu mendapatkan perhatian serius bagi kita adalah bagaimana merumuskan kerja akademis guru, secara khusus guru agama katolik berhadapan dengan hegemoni kapitalisme global. Problem hegemoni kapitalisme global yang telah disebutkan di atas paling tidak menuntun kita untuk berpikir lebih lanjut mengenai bagaimana para guru harus berhadapan dengan dinamika pembungkaman pendidikan, industrialisasi pendidikan, komersialisasi pendidikan, dan krisis identitas guru yang dialami akhir-akhir ini. Persoalan-persoalan ini mendorong kita sekalian untuk dapat mengambil sikap secara tegas, mereimajinasi dan membangun kembali identitas guru ideal dalam dunia dewasa ini. Dalam konteks itu, pertanyaan yang perlu diberi jawaban adalah *identitas guru ideal seperti apakah yang diharapkan dalam dunia dewasa ini?*

Jawaban atas pertanyaan tersebut, pertama-tama bisa ditempatkan dalam konteks permenungan Hendry A Giroux. Giroux dalam praktek pendidikan kritis memandang peran dan posisi kaum intelektual sebagai kelompok intelektual publik oposisional. Giroux dalam *Impure Acts: the practical politic of culture studies* (2002) mengkonsepsikan peran intelektual publik oposisional sebagai kelompok akademisi yang tidak membatasi lingkup kajiannya pada dunia akademik semata; akan tetapi memperhatikan juga dunia non-akademis dengan misi perubahan sosial. Cita-cita perubahan sosial dilakukan dengan mengkritisi praktik kerja budaya dan pendidikan yang cenderung dibatasi pada kerja menganalisis dan membangun teori-teori mutahir. Sebaliknya, kelompok intelektual publik oposisional praktik kerja budaya seyogyanya memperhatikan

secara kritis berbagai fenomena sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat seperti kekuasaan yang menguasai masyarakat baik secara politik maupun ekonomi.

Teori dan analisis seyogyanya perlu berhubungan dengan kenyataan non-akademis yang dijumpai dalam kenyataan hidup sehari-hari. Dalam konteks itu, konsep intelektual publik oposisional dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi kita dalam merekonstruksi identitas guru ideal di tengah arus hegemoni kapitalisme global. Dengan cara semacam ini, para guru diharapkan dapat tampil dan bertindak secara kritis dalam menyikapi tuntutan globalisasi. Secara khusus menjadi dasar pertimbangan kritis bagi kita dalam menyikapi kondisi pendidikan yang cenderung mengedepankan logika ekonomi politik. Artinya, model pendidikan bersifat deterministik dan menjadi alat kekuasaan politik. Bahkan model pendidikan yang memposisikan lembaga pendidikan sebagai pusat produksi dan reproduksi tenaga kerja.

Di sisi lain, suasana dialogis yang berorientasi pada model pendidikan kritis, mendorong para guru untuk memperhatikan secara serius kedudukan subyek dalam praktik pendidikan. Kategori subyek menjadi penting untuk membangun ruang dialogis antara guru dan murid serta meminimalisir hubungan transaksional guru-murid. Kondisi semacam ini memungkinkan guru-murid dapat berinteraksi secara bebas tanpa ada tekanan dan memunculkan pengakuan terhadap keragaman pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki subyek didik. Senada dengan itu, Herbert mengingatkan kita agar memperhatikan secara seksama hubungan dialogis guru-murid. Dengan cara semacam ini, fleksibilitas dalam proses belajar mengajar menjadi unsur penting demi tercipta ruang dialogis. Dengan kata lain, meski sang guru telah mempersiapkan secara

sistematis materi yang akan disampaikan kepada siswa; akan tetapi sedapat mungkin perlu membuka ruang dialog dengan siswa dalam mengeksplorasi kekayaan pengetahuan siswa”.¹⁷

Model pembelajaran semacam ini sebetulnya tidak menafikan keberagaman model pembelajaran yang dimiliki oleh guru; sebaliknya semakin menguatkan identitas subyek didik. Senada dengan itu, Paulo Freire dan Mikhail Bakhtin menekankan pentingnya pengakuan terhadap “*human experiences, contested, and legitimated with everyday classroom life*”.¹⁸ Bakhtin melalui kategori bahasa menjadi sarana dalam proses pembentukan pengertian dan pengetahuan subyek didik.¹⁹ Melalui bahasa, pengetahuan dan pengertian subyek didik mendapatkan pengakuan. Demikian pula, Freire dalam praktek pendidikan kritis menggunakan bahasa sebagai media komunikasi dalam mengembangkan dialog kritis. Melalui bahasa, orang dapat menyampaikan apa yang diketahui dan memperoleh makna. Dalam konteks itulah, pengalaman subyek didik dapat dimaknai secara lebih efektif. Singkatnya, bahasa tidak sekedar menjadi sarana komunikasi pengalaman; akan tetapi menduduki peranan penting dalam proses pembentukan pengetahuan.

5. Guru Agama Katolik dalam Imajinasi Pendidikan Kritis

Secara khusus, posisionalitas guru agama katolik dalam hegemoni kapitalisme global diarahkan pada proses kontruksi identitas guru agama katolik yang kritis dan oposisional. Guru agama katolik dituntut untuk

¹⁷“Lecturing out there with the other” dalam Anna Herbert, *The Pedagogy of Creativity*, 71.

¹⁸Henry A. Giroux, *Pedagogy and the politics of hope: Theory, culture, and schooling* (United States of America: Westview Press, 1997),133.

¹⁹Ibid., 132.

tidak sekedar menjadi tenaga profesional yang bungkam terhadap rezim pendidikan kapitalisme, menjadi pelayan bourgeois, bahkan agen kapitalis; akan tetapi secara kritis terlibat dalam proses pembentukan wacana kritis, analisis wacana kritis, dan pengamalan wacana kritis. Pembentukan wacana kritis merujuk pada proses pembentukan pengetahuan melalui pendidikan formal. Melalui proses ini, para guru agama diharapkan dapat melihat bagaimana kehadiran mereka dan seluruh kegiatannya baik di sekolah dan masyarakat berdasarkan realitas objektif sosial yang sedang dihadapi. Pada titik ini, keterlibatan guru agama katolik dalam praktik pendidikan kritis dituntut untuk mampu mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang dapat mendukung proses pembelajaran berdasarkan kebutuhan riil.²⁰

Di sisi lain, dengan cara semacam ini, subjek didik dapat dimungkinkan untuk mempertimbangkan kebutuhannya berdasarkan kondisi riilnya melalui pendidikan. Analisis wacana kritis dalam praksis pendidikan bertujuan untuk memproduksi pengetahuan subyek didik. Dalam konteks itu, hubungan dialogis guru-murid dapat diefektifkan baik dalam proses produksi maupun rekonstruksi pengetahuan. Cara pandang semacam ini, paling tidak sejalan dengan kuasa mengajar yang diberikan kepada para guru agama dalam: (i) mengkomunikasikan di antara orang-orang beriman dan memperkembangkan iman satu sama lain; (ii) mengembangkan pengetahuan dan penghayatan akan iman; (iii) memberikan kesaksian pribadi; dan (iv) menghadirkan Roh Kudus secara dialogis.

²⁰Ibid., 136.

Demikian pula, dalam proses implementasi wacana kritis. Pada tahap ini, seluruh pengetahuan yang diproduksi diharapkan agar mampu diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks itu, peran guru agama dan subyek didik diarahkan pada upaya memaknai sejarahnya, kondisi budaya dan politik yang sedang dihadapi secara baru.²¹ Oleh sebab itu, proses pendidikan agama katolik diharapkan dapat mempersiapkan subjek didik untuk secara otonom dan mandiri mampu mengembangkan diri dan mengaplikasikan pengetahuannya dalam praksis hidup sehari-hari. Proses belajar mengajar yang terjadi di dalam kelas mengandaikan bahwa guru tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai pengajar yang menyebarkan pengetahuan kepada muridnya melainkan mau berdialog dengan siswa dalam keseharian hidup. Dengan cara semacam ini, siswa dapat tumbuh menjadi pribadi yang otonom dalam mengaplikasikan pengetahuannya dalam hidup sehari-hari.

Penutup

Tiga pokok persoalan sentral yang dikemukakan di atas merupakan separoh dari perjalanan kita dalam menyikapi dinamika pendidikan akhir-akhir ini. Dalam konteks itu, berbagai langkah strategis diharapkan dapat dipakai sebagai jalan untuk mendorong terwujudnya perubahan radikal dalam dunia pendidikan. Terutama mengubah praksis pendidikan yang cenderung mengedepankan logika ekonomi dari pada logika sosial. Dengan cara semacam ini, pendidikan sebagai aktivitas fundamental manusia dalam memanusiakan manusia muda secara perlahan-lahan dapat terwujud. Secara khusus, dalam praksis pendidikan agama katolik. Tujuan pendidikan agama katolik untuk menciptakan pribadi-pribadi yang unggul

²¹Ibid., 140.

sejatinya terletak pada upaya Gereja dan seluruh komponen pendidik agama katolik berupaya secara maksimal dalam membangun kesadaran kritis subjek didik. Dengan kata lain, pendidikan agama katolik mesti mendorong setiap subjek didik untuk mengenal rezim kekuasaan yang membelenggunya kebanyakan lembaga pendidikan dan aparat pendidiknya

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ansow, Joseph. *Misi Edukatif Sekolah Katolik: Legitimasi Pendidikan Agama Katolik di Sekolah Katolik*. Manado: STF-SP, 2005.
- Faucault, Michael. *Discipline and Punish: The Birth of the prison*. Terj. Alan Sheridan dari judul asli *Surveiller et punir*, New York: Vintage Books, 2079.
- Giroux, Hendri A. *Impure Acts: the practical politic of culture studies*. New York: Routledge, 2000.
- _____. *Pedagogy and the politics of hope: Theory, culture, and schooling*. United States of America: Westview Press, 1997.
- Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI. *Dokumen konsili vatican II, "Gravissimum educationis"*, Terjemahan dari naskah resmi bahasa Latin oleh R. Hardiwiryan, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI dan Obor, 2004.
- Hall, Donald E. *Subjectivity: The New critical Idion*, New York and London: Routledge, 2004.
- Herbet, Anna. *Pedagogy of Creativity*. Canada: Routledge, 2010.
- Johanes Oentoro, "Perguruan Tinggi kita: Tugas dan Tantangannya di masa kini" dalam Alexander Jatmiko W. *Peran perguruan tinggi dalam penyiapan SDM yang kritis dan bermoral: sebuah harapan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Julia Menard-Warwick, "Both a fiction and an existential fact: theorizing identity in second language acquisition and literacy studies" dalam *Linguistics and Education*, 257, 2005.

- Kartono, St. *Sekolah bukan pasar*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Laclau, Ernesto and Chantal Mouffe. *Hegemony & Social Strategy: Towards a Radical Democratic Politic*. London-New York: Verso, 1985.
- Mohammad Hatta, “Tanggungjawab moral kaum intelegensi” dalam Aswab Mahasin & Ismed Nasir. *Cendekiawan dan Politik*. Jakarta: LP3S, 1983.
- Nota Pastoral KWI 2008 tentang pendidikan dan keputusan sidang pleno XIII KOMDIK KWI pada tanggal 8 s.d. 10 oktober 2009 di Denpasar dengan tema: “lembaga pendidikan katolik: media pewartaan kabar gembira, unggul dan lebih berpihak kepada yang miskin”.
- Sutrisno, Madji & Hender Putranto. *Teori-teori kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Storey, John. *Teori Budaya dan budaya pop: memetakan konsep cultural studies*, Terj.Elli El Fajri. Yogyakarta: Qalam, 2003.